

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (PENELITIAN PADA BADAN PENGELOLA ASET DAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD) PROVINSI JAWA TIMUR)

Oleh:

¹Jne Riske Rahmasi, ²Siti Asiah Murni*

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Kec. Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur 60225

Email: rjneriske@gmail.com¹, sitiasiahmurni@uwks.ac.id²

*) Correspondence author: sitiasiahmurni@uwks.ac.id

ABSTRACT

Agencies, established by the government to handle its affairs, play a crucial role in the successful execution of the mission to achieve the aspirations of the Indonesian state. The accomplishments of government agencies can be gauged through information on the performance accountability of each respective government institution. This information is essential, as it serves as the basis for governmental decision-making in improving management practices for better governance. The objective of this research is to analyze the influence of budget clarity and reporting system on the performance accountability of government agencies, with accounting control as a moderating variable. The sample for this study comprises employees working in the Finance Department (Accountancy BPKAD) or related financial fields, totaling 57 respondents, and the data were processed using SPSS. Data collection involved primary data obtained through targeted sources via questionnaire distribution. The research findings indicate that accounting control moderates the clarity of budget goals and reporting systems concerning the performance accountability of BPKAD agencies.

Keywords: *Clarity Of Budget Goals, Reporting System, Agency Performance Accountability, Accounting Control*

ABSTRAK

Instansi sebagai pelaksana yang dibentuk pemerintah untuk menangani urusan-urusan pemerintahannya, merupakan salah satu penentu berjalannya misi dengan baik untuk mencapai cita-cita negara Indonesia. Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan karena berdasarkan informasi tersebut pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi, dengan pengendalian akuntansi sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan atau pegawai

yang bekerja di bidang Akuntansi BPKAD atau bidang lainnya, tetapi yang berhubungan dengan keuangan dan ditetapkan sebanyak 57 responden yang kemudian data diolah menggunakan SPSS. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari sumber tertuju dengan melakukan penyebaran kuesioner. Penelitian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi memoderasi kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi BPKAD.

Kata kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi, Pengendalian Akuntansi

PENDAHULUAN

Manajemen keuangan efisien dan transparan adalah kunci untuk kinerja optimal di sektor publik, terutama di tingkat provinsi seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD). Tanggung jawab besar pemerintah dalam mengelola keuangan publik untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penuh semakin kritis, terutama dalam konteks dinamika ekonomi global 2023 yang masih dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. BPKAD Provinsi Jawa Timur dan sektor publik lainnya dihadapkan tekanan besar untuk menjalankan pengelolaan keuangan dengan bijaksana dan transparan. Penetapan sasaran anggaran yang jelas adalah langkah awal penting dalam menyusun rencana anggaran yang memadai. Sasaran yang terdefinisi dengan baik, memberikan dasar kuat bagi organisasi untuk merencanakan pengeluaran dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Sasaran anggaran yang jelas membantu organisasi memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan. Di tengah dinamika ekonomi tahun 2023, di mana pemerintah menghadapi tekanan fiskal, penetapan sasaran anggaran yang jelas menjadi sangat krusial untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien, sejalan dengan prioritas utama pemulihan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Selain sasaran anggaran, sistem pelaporan yang efektif juga merupakan kebutuhan mutlak dalam proses manajemen keuangan, terutama di tahun 2023 yang penuh tantangan. Sistem pelaporan yang kuat memungkinkan organisasi untuk secara teratur memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan, mendeteksi potensi risiko, dan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Di tengah pandemi, informasi keuangan dan kinerja yang transparan menjadi lebih signifikan, sejalan dengan tuntutan masyarakat untuk penggunaan anggaran yang transparan sesuai dengan tujuan penanggulangan pandemic dan pemulihan ekonomi. Pentingnya pengendalian akuntansi dalam manajemen keuangan tidak dapat diabaikan. Pengendalian ini melibatkan penerapan sistem dan prosedur untuk memastikan keandalan informasi keuangan dan mencegah penyalahgunaan dana. Di tahun 2023, di tengah kompleksitas ekonomi dan persaingan yang ketat, pengendalian akuntansi yang efektif menjadi lebih krusial untuk mencegah kebocoran dana, kehilangan aset, atau tindakan yang tidak sesuai. Dalam penelitian ini, pengendalian akuntansi juga akan menjadi variable moderasi yang potensial mempengaruhi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan akuntabilitas kinerja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur memiliki peran krusial dalam mengelola urusan keuangan dan aset di tingkat provinsi. Kinerja BPKAD secara langsung mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, memahami bagaimana kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi mempengaruhi akuntabilitas kinerja BPKAD menjadi penting untuk pengambilan keputusan yang terinformasi dan peningkatan manajemen keuangan. Meskipun penelitian terdahulu telah

menekankan pentingnya sasaran anggaran yang jelas, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi, masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang menyelidiki interaksi komprehensif dari faktor-faktor keuangan ini terhadap kinerja organisasi, terutama dalam konteks kantor BPKAD di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan fokus pada dinamika dan tantangan unik BPKAD, memberikan wawasan yang lebih akurat mengenai dampak faktor-faktor keuangan ini terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian ini juga berusaha menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, menggabungkan prinsip-prinsip teoritis dengan pertimbangan praktis, terutama dengan mempertimbangkan peran mediasi dari pengendalian akuntansi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih tepat untuk mitigasi risiko dan optimalisasi organisasi di tengah kondisi ekonomi dan sosial yang baru ini. Dalam konteks kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur, keberhasilan manajemen keuangan dapat memiliki dampak langsung pada layanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian yang menyelidiki hubungan komprehensif antara faktor-faktor keuangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan manajemen keuangan di tingkat lokal dan pada akhirnya mendorong kinerja organisasi yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Transparansi

Transparansi adalah kebijakan terbuka yang memungkinkan pengawasa, sedangkan informasi mencakup data terkait kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Tujuan keterbukaan informasi adalah menciptakan persaingan politik yang sehat dan kebijakan yang berlandaskan pada preferensi publik. Menurut teori transparansi oleh Mardiasmo (2002), hal ini menekankan keterbukaan organisasi pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk memahami secara terbuka dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya sesuai peraturan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran, sebagai alat penting dalam perencanaan dan pengendalian jangka pendek, memainkan peran krusial dalam organisasi. Fungsi anggaran mencakup pengelolaan sumber daya dengan ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai kinerja yang diharapkan dan menumbuhkan akuntabilitas terhadap masyarakat. Dokumen formal anggaran pemerintah, hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif, mengatur belanja dan pendapatan, mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah, dan memberi landasan bagi perolehan pendapatan dan pembiayaan dalam suatu periode. Kejelasan sasaran anggaran menjadi kunci, memastikan tujuan ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar dimengerti oleh yang bertanggung jawab, sementara ketidakjelasan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga, kejelasan sasaran anggaran memiliki peran sentral dalam memfasilitasi pertanggungjawaban dan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi.

Sistem Pelaporan

Akuntabilitas, Agustin (2018), adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap aktivitasnya kepada pemberi amanah. Pelaporan keuangan sektor publik bertujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas organisasi untuk keputusan alokasi sumber daya. Sistem pelaporan dianggap baik jika sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan sektor publik (Belkaoui, 2000). Irawati dan Agesta (2019) menyoroti pentingnya sistem pelaporan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menurut Pamungkas (2012), adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui sistem pertanggungjawaban periodik. Dalam konteks penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, penilaian bertujuan memastikan pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi dan karir. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pengukuran kinerja dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendukung pengambilan keputusan manajemen, dapat melihat catatan kegiatan, wawancara, dan pendapat para ahli. Mardiasmo (2019) membagi akuntabilitas menjadi vertikal (kepada otoritas yang lebih tinggi) dan horizontal (kepada masyarakat). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, melibatkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tujuan dan sasaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencakup efisiensi, efektivitas, responsivitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan publik.

Pengendalian Akuntansi

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 menetapkan integrasi pengendalian akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah. Pengendalian akuntansi, yang mencakup prosedur dan dokumentasi, bertujuan menjaga keamanan aset, mencatat transaksi keuangan, dan menjamin keandalan catatan keuangan. Sistem ini, menurut Mardiasmo (2009), berfungsi secara formal untuk mengelola sumber daya dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Prosedur pengendalian akuntansi, sebagaimana dijabarkan oleh Bastian (2010), dimaksudkan untuk memastikan keandalan informasi keuangan, melindungi aset dan catatan organisasi, serta mematuhi kebijakan dan regulasi pemerintah. Dengan pengendalian akuntansi yang efektif, pelaksanaan kinerja keuangan dapat diatur secara efisien, mendukung pengambilan keputusan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.

Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi

Kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi saling terkait dalam manajemen keuangan organisasi. Sasaran anggaran berperan penting sebagai tujuan

keuangan spesifik, menetapkan standar kinerja, dan menjadi dasar pelaksanaan keuangan. Dalam konteks ini, pengendalian akuntansi menggunakan informasi keuangan untuk memantau pencapaian sasaran anggaran. Perbandingan hasil aktual dengan standar anggaran menjadi fokus utama, membantu identifikasi varian dan memastikan alokasi dana sesuai. Kejelasan sasaran anggaran memandu perencanaan strategis dan alokasi sumber daya, sementara pengendalian akuntansi menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang mendukung sasaran tersebut. Integrasi kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi memungkinkan pencapaian efisiensi keuangan, identifikasi risiko, dan respons yang efektif terhadap perubahan kondisi ekonomi atau bisnis.

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Signifikan terhadap Pengendalian Akuntansi.

Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi

Sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi dalam manajemen informasi keuangan saling terkait. Sistem pelaporan menyajikan data keuangan dengan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. sementara itu, pengendalian akuntansi memastikan integritas dan keamanan informasi keuangan dengan memonitor penyusunan laporan dan memitigasi risiko kesalahan atau manipulasi. keduanya juga mendukung audit internal dan eksternal serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Integrasi sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi membantu organisasi menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya, menjaga kepatuhan, dan meningkatkan transparansi untuk memenangkan kepercayaan stakeholders.

H2: Sistem Pelaporan Berpengaruh Signifikan terhadap Pengendalian Akuntansi.

Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh besar pada akuntabilitas kinerja instansi. Sasaran anggaran sebagai tujuan keuangan spesifik memberikan dasar untuk standar kinerja yang jelas. Akuntabilitas kinerja menjadi krusial dengan pemantauan aktif terhadap pencapaian sasaran keuangan dan identifikasi varian kinerja. Transparansi pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh sasaran anggaran, sementara akuntabilitas kinerja memastikan penggunaan dana sesuai prioritas dan strategi instansi. Kejelasan sasaran anggaran juga membantu menetapkan tanggung jawab bagi pemangku kepentingan, dan akuntabilitas kinerja melibatkan pemantauan responsibilitas tersebut. Integrasi antara kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja menciptakan dasar yang kuat untuk efisiensi, transparansi, dan peningkatan tanggung jawab dalam mencapai tujuan keuangan instansi.

H3: Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi saling terkait untuk menciptakan manajemen organisasi yang efektif dan transparan. Sistem pelaporan berfungsi sebagai mekanisme penyajian informasi keuangan dan operasional, memberikan gambaran hasil operasional, pencapaian tujuan, dan penggunaan sumber daya secara rinci. Akuntabilitas kinerja memastikan bahwa informasi yang disajikan mencerminkan pencapaian instansi, dan bahwa setiap keputusan manajerial dipertanggungjawabkan berdasarkan laporan tersebut. Transparansi operasional, hasil dari sistem pelaporan yang efisien, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami kinerja dan keputusan manajerial. Akuntabilitas kinerja juga memastikan respons terhadap hasil evaluasi kinerja, memungkinkan identifikasi are perbaikan dan langkah-langkah korektif untuk perbaikan

berkelanjutan. Integrasi erat antara kedua sistem ini menciptakan dasar yang kokoh untuk pertanggungjawaban efektif, transparansi operasional, dan peningkatan berkelanjutan, membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan meningkatkan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan dan tanggungjawabnya.

H4: Sistem Pengendalian Berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Pengendalian Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pengendalian akuntansi dan akuntabilitas kinerja instansi saling terkait dalam mencapai tujuan dan menjalankan operasional organisasi secara efektif. Pengendalian akuntansi menetapkan standar kinerja dan prosedur akuntansi untuk memastikan keandalan informasi keuangan. Akuntabilitas kinerja menggunakan standar tersebut sebagai pegangan untuk mengukur pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas hasil kinerja. Pemantauan aktif atas aktivitas keuangan membantu mendeteksi perbedaan antara hasil aktual dan standar, yang dievaluasi oleh akuntabilitas kinerja untuk merancang langkah perbaikan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengendalian akuntansi menciptakan transparansi dan menjadi dasar informasi untuk akuntabilitas kinerja terhadap pemangku kepentingan. Pengendalian akuntansi juga fokus pada efisiensi pengeluaran dan kepatuhan terhadap kebijakan, sementara akuntabilitas kinerja menekankan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum. Proses audit internal dan eksternal didukung oleh pengendalian akuntansi, dievaluasi oleh akuntabilitas kinerja untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Integrasi yang baik antara keduanya menciptakan fondasi solid untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien, menjaga transparansi, dan membangun pertanggungjawaban yang kuat kepada semua pemangku kepentingan.

H5: Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Pengendalian Akuntansi memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi saling melengkapi dalam konteks akuntabilitas kinerja instansi. Sasaran anggaran memberikan landasan untuk tujuan keuangan yang spesifik, memandu kinerja instansi. Pengendalian akuntansi, sebagai elemen kunci manajemen, memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prosedur akuntansi. Kejelasan sasaran anggaran membentuk dasar penetapan standar kinerja, dengan pengendalian akuntansi memastikan konsistensi dengan sasaran anggaran. Panduan tersebut mendukung pemantauan kinerja, di mana pengendalian akuntansi memoderasi proses pemantauan dan evaluasi, serta memperkuat analisis varian kinerja. Kejelasan sasaran anggaran juga mendukung pertanggungjawaban dan transparansi, dengan pengendalian akuntansi memoderasi penyusunan laporan keuangan akurat. Selain itu, alokasi dana untuk efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan didukung oleh kejelasan sasaran anggaran, dengan pengendalian akuntansi memastikan penggunaan anggaran yang efektif. Pengendalian akuntansi juga mendukung audit internal dan eksternal, memperkuat pertanggungjawaban melalui evaluasi efektivitas pengendalian dan respons terhadap rekomendasi audit. Integrasi keduanya menciptakan lingkungan yang mendukung pertanggungjawaban efektif dan pencapaian tujuan organisasi.

Sistem pelaporan yang efektif menyajikan informasi keuangan dan operasional yang transparan dan akurat, sedangkan pengendalian akuntansi memastikan keakuratan dan keandalan informasi tersebut. Dengan melibatkan prosedur verifikasi data, penilaian

kepatuhan terhadap kebijakan, dan pemastian bahwa laporan mencerminkan keadaan sebenarnya, pengendalian akuntansi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan informasi yang dilaporkan dan akuntabilitas kinerja. Sistem pelaporan memberikan gambaran pencapaian tujuan, sementara pengendalian akuntansi memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Lebih dari sekadar pemantauan, pengendalian akuntansi juga mendeteksi varian atau ketidaksesuaian dalam proses pelaporan, memungkinkan instansi untuk merespons cepat dan menjaga integritas informasi yang dilaporkan. Dengan menjadi variabel mediasi, pengendalian akuntansi berfungsi sebagai perantara yang memproses dan menjaga keandalan informasi, sehingga mendukung pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan dalam konteks akuntansi.

H6: Pengendalian Akuntansi memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi.

H7: Pengendalian Akuntansi memoderasi pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan kemampuan anggaran untuk memberikan informasi yang jelas, terperinci, dan mudah dipahami tentang tujuan, sasaran, dan hasil yang diinginkan oleh pemerintah melalui penggunaan dana publik. Pengukuran variabel ini melibatkan indikator seperti perencanaan, bidang kegiatan, tingkat pengembalian, pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, dan ketersediaan informasi dalam dokumen perencanaan dan anggaran online. Kejelasan sasaran anggaran menjadi kunci untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman yang baik terkait penggunaan dana publik dalam pelaksanaan program pemerintah. Penelitian terbaru oleh Asgary et al. (2020) menegaskan peran vital sistem pelaporan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan organisasi. Evaluasi terhadap kualitas informasi, waktu penyampaian laporan, responsivitas, kepuasan pengguna, pemahaman informasi keuangan, dan penggunaan informasi sebagai alat koreksi menjadi indikator kunci efektivitas sistem pelaporan untuk peningkatan kinerja organisasi.

Akuntabilitas kinerja adalah kemampuan suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak-pihak berkepentingan. Ini melibatkan indikator seperti akuntabel, partisipatif, transparansi, penetapan perencanaan strategis, keluaran (output), pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, tingkat kepuasan masyarakat, dan pemanfaatan informasi kinerja. Dengan demikian, organisasi yang akuntabel dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan melibatkan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan dan pelayanan yang lebih baik.

Pengendalian akuntansi merupakan kebijakan dan prosedur untuk memastikan akurasi laporan keuangan. Indikator pengukuran termasuk kepatuhan hukum, kualitas catatan dan dokumen akuntansi, efektivitas pengendalian internal, efisiensi operasi, serta kualitas informasi akuntansi. Dengan demikian, pengendalian akuntansi krusial untuk memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan suatu entitas.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Staf BPKAD dengan jumlah keseluruhan 69 orang dengan 5 bidang, sedangkan sampel penelitian adalah sebagian dari Staf BPKAD

yang bekerja di bidang Akuntansi atau di bidang lainnya tetapi yang berhubungan dengan keuangan. Perhitungan penentuan jumlah sampel berdasarkan rumus Krejcie and Morgan:

$$n = \frac{N}{1 + N(0.05)^2}$$

Diperoleh hasil dari perhitungan diatas bahwa sampel yang harus diteliti sebanyak 57.

Teknik Analisis Data

Terdapat beberapa uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, path, pengujian hipotesis, uji F, uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menggunakan kuisisioner dalam bentuk fisik yang disebarakan kepada staf BPKAD Prov. Jawa Timur. Kuesioner yang diolah sebanyak 59 data. Dari total responden yang ada diklasifikasikan berdasarkan usia, lama bekerja, pendidikan terakhir, jenis kelamin, dan jabatan.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

Persamaan I		
Asymp. Sig	α	Keterangan
0.138	0.00	Normal
Persamaan II		
0.209	0.05	Normal

Tabel berikut digunakan untuk menguji normal tidaknya sebuah model regresi uji normalitas yang digunakan adalah mode *komlogrov smirnov test*, dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Tabel 2
Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Persamaan I		Persamaan II		Kesimpulan
	VIF	Tolerance	VIF	Tolerance	
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	1.866	0.536	2.146	0.466	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sistem Pelaporan (X2)	1.866	0.536	2.199	0.455	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengendalian Akuntansi (Z)	-	-	2.029	0.493	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Dari tabel 2, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3
Model Persamaan I

Uji F sebesar 28,808 dengan nilai Sig 0.000			
Model	B	t	Sig.
(Constant)	15,298	3,434	,001
1 X1	,373	2,897	,005
X1	,616	3,162	,003

Berdasarkan tabel 3, diperoleh model persamaan regresi I dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Z = 15,298 + 0,373X_1 + 0,616X_2$$

Berdasarkan tabel 3, hasil uji F pada persamaan I menunjukkan bahwa nilai F I sebesar 28,808 dengan nilai signifikansi 0.000. Hal ini menunjukkan *Goodness of fit* dapat dilihat dari hasil uji F dari model persamaan I nilai signifikansi uji $F < \alpha$ (alpha) atau $0,000 < 0,05$, jadi, dapat disimpulkan bahwa uji model persamaan I ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Dari hasil regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 15,298. Konstanta bernilai positif yang berarti apabila semua variabel bebas yaitu kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan bernilai nol, maka pengendalian akuntansi di instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur bernilai 15,298. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan dalam kondisi tetap atau tidak mengalami perubahan maka masih tetap ada pengendalian akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.
2. Koefisien regresi dari variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) sebesar 0,373. Konstanta bernilai positif yang berarti menandakan adanya hubungan yang searah antara variabel kejelasan sasaran anggaran dengan variabel pengendalian akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD). Artinya, jika variabel sistem pelaporan bernilai tetap atau konstan sedangkan variabel kejelasan sasaran anggaran mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka pengendalian akuntansi di instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur akan mengalami peningkatan sebesar 0,373. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin jelas sasaran anggaran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur maka akan semakin baik pula pengendalian akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.
3. Koefisien regresi dari variabel sistem pelaporan (X_2) sebesar 0,616. Konstanta bernilai positif yang berarti menandakan adanya hubungan yang searah antara variabel sistem pelaporan dengan variabel pengendalian akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD). Artinya, jika variabel kejelasan sasaran anggaran bernilai tetap atau konstan sedangkan variabel sistem pelaporan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka pengendalian akuntansi di instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur akan mengalami peningkatan sebesar 0,616. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin baik sistem pelaporan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur maka akan semakin baik pula pengendalian akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4
Model Persamaan II

Uji F sebesar 36,022 dengan nilai Sig 0.000			
Model	B	t	Sig.
(Constant)	4,966	1,391	,170
X1	,201	2,498	,021
X1	,192	2,646	,018
Z	,465	4,780	,000

Berdasarkan tabel 4, hasil uji F dari model persamaan II sebesar 36,202 serta nilai signifikansi uji F dari masing-masing model persamaan II sebesar 0,000 dengan nilai α (alpha) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan *Goodness of fit* dapat dilihat dari hasil uji F dari model persamaan II nilai signifikansi uji F < α (alpha) atau 0,000 < 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji model persamaan II ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Dari tabel 4, diperoleh model persamaan regresi II dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 4,966 + 0,201X_1 + 0,192X_2 + 0,465Z$$

Dari hasil regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 4,966. Konstanta bernilai positif yang berarti apabila semua variabel bebas yaitu kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi bernilai nol, maka akuntabilitas kinerja instansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur bernilai 4.966. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi dalam kondisi tetap atau tidak mengalami perubahan maka masih tetap ada akuntabilitas kinerja instansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.
2. Koefisien regresi dari variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) sebesar 0,201. Konstanta bernilai positif yang berarti menandakan adanya hubungan yang searah antara variabel kejelasan sasaran anggaran dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD). Artinya, jika variabel sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi bernilai tetap atau konstan sedangkan variabel kejelasan sasaran anggaran mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas kinerja instansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur akan mengalami peningkatan sebesar 0,201. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin jelas sasaran anggaran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.
3. Koefisien regresi dari variabel sistem pelaporan (X_2) sebesar 0,192. Konstanta bernilai positif yang berarti menandakan adanya hubungan yang searah antara variabel sistem pelaporan dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD). Artinya, jika variabel kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi bernilai tetap atau konstan sedangkan variabel sistem pelaporan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas kinerja instansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur akan mengalami peningkatan sebesar 0,192. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin baik sistem pelaporan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.
4. Koefisien regresi dari variabel pengendalian akuntansi (Z) sebesar 0,465. Konstanta bernilai positif yang berarti menandakan adanya hubungan yang

searah antara variabel pengendalian akuntansi dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD). Artinya, jika variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan bernilai tetap atau konstan sedangkan variabel pengendalian akuntansi mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas kinerja instansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur akan mengalami peningkatan sebesar 0,465. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin baik baik pengendalian akuntansi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.

Tabel 6
Hasil Uji *Sobel Test*

Variabel	Input		<i>t</i>	P-Value	α	Keputusan
Kejelasan Sasaran Anggaran	a	0,373	2,476	0,013	0,05	Signifikan
	b	0,465				
	Sa	0,129				
	Sb	0,097				
Sistem Pelaporan	a	0,616	2,638	0,008		Signifikan
	b	0,465				
	Sa	0,195				
	Sb	0,097				

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan *sobel test* pada tabel 6, diperoleh perhitungan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) memiliki nilai *t* yakni 2,476 dengan taraf signifikansi $0,013 < 0,05$. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima yang berarti bahwa pengendalian akuntansi (Z) mampu memediasi variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) terhadap akuntabilitas kinerja instansi (Y), sehingga hipotesis keenam yang menyatakan bahwa: Terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran (X_1) terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi (Y) melalui pengendalian akuntansi (Z) dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Variabel sistem pelaporan (X_2) memiliki nilai *t* yakni 2,638 dengan taraf signifikansi $0,008 < 0,05$. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa pengendalian akuntansi (Z) mampu memediasi variabel kejelasan sistem pelaporan (X_2) terhadap akuntabilitas kinerja instansi (Y), sehingga hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa: Terdapat pengaruh sistem pelaporan (X_2) terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi (Y) melalui pengendalian akuntansi (Z) dapat dibuktikan kebenarannya.

PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh

signifikan terhadap pengendalian akuntansi di BPKAD Provinsi Jawa Timur. Responden menyatakan setuju bahwa penentuan sasaran kerja dan anggaran mudah dipahami, menciptakan pemahaman bersama tentang tujuan finansial dan operasional instansi. Dengan pemahaman ini, pengendalian akuntansi dapat diarahkan secara lebih spesifik untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran anggaran yang jelas memberikan landasan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah, sementara pengendalian akuntansi memastikan alokasi anggaran yang efisien dan sesuai dengan tujuan. Kesimpulannya, kejelasan sasaran anggaran berkontribusi pada peningkatan pengendalian akuntansi di BPKAD Provinsi Jawa Timur. Penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap pengendalian akuntansi di BPKAD Provinsi Jawa Timur. Penyajian laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam organisasi. Sistem pelaporan yang efektif membantu identifikasi dan penyelesaian masalah dengan cepat dan efisien, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengendalian akuntansi menggunakan informasi ini untuk memantau transaksi keuangan, memastikan keakuratan pencatatan, dan mengidentifikasi potensi masalah. Sistem pelaporan yang baik menciptakan transparansi dan mendeteksi dini kecurangan atau kesalahan. Pengendalian akuntansi merespon dengan menegakkan prosedur kontrol internal untuk mengurangi risiko kesalahan, manipulasi, atau kecurangan. Sistem pelaporan tidak hanya memenuhi kebutuhan manajemen internal tetapi juga memenuhi persyaratan pihak eksternal seperti auditor, regulator, atau pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, kualitas sistem pelaporan berkorelasi positif dengan efektivitas pengendalian akuntansi di suatu instansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi di BPKAD Provinsi Jawa Timur. Pernyataan dari para pekerja di BPKAD Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa anggaran yang disusun dapat dipertanggungjawabkan di pusat, memudahkan pemantauan kinerja, dan mencakup sasaran anggaran yang jelas, terukur, dan dapat dicapai. Akuntabilitas kinerja instansi mencerminkan tanggung jawab organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan hasil kepada pemangku kepentingan. Kejelasan sasaran anggaran memengaruhi pemahaman dan fokus organisasi dalam mencapai tujuan yang telah dianggarkan. Dengan demikian, semakin jelas sasaran anggaran di BPKAD Provinsi Jawa Timur, semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi di lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi di BPKAD Provinsi Jawa Timur, membuktikan kebenaran hipotesis keempat. Para pekerja di BPKAD Provinsi Jawa Timur memberikan tanggapan positif terkait pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Informasi keuangan yang terkonsolidasi disajikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pihak berkepentingan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan memberikan bukti konkret terkait pencapaian tujuan dan penggunaan anggaran, memperkuat pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Informasi dari sistem pelaporan juga menjadi dasar untuk merancang perbaikan dan inovasi dalam kinerja instansi. Oleh karena itu, semakin baik sistem pelaporan yang diterapkan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur, semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi di BPKAD Provinsi Jawa Timur, membuktikan kebenaran hipotesis kelima. Dengan adanya pengendalian akuntansi, instansi pemerintah dapat mengontrol operasi dengan lebih efektif, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan estimasi biaya serta profitabilitas keberhasilan tertentu. Pengendalian akuntansi juga memungkinkan instansi memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, semakin baik pengendalian akuntansi yang diterapkan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur, semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel mediasi, yaitu pengendalian akuntansi, memiliki pengaruh signifikan dalam menghubungkan kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja akuntansi di BPKAD Provinsi Jawa Timur. Ini membuktikan kebenaran hipotesis keenam dalam penelitian ini. Kejelasan sasaran anggaran menciptakan dasar yang jelas bagi pengendalian akuntansi, yang berperan sebagai jembatan antara kejelasan sasaran anggaran dan pencapaian kinerja akuntansi yang akuntabel. Pengendalian akuntansi tidak hanya memfasilitasi pencapaian sasaran anggaran, tetapi juga mendeteksi perbedaan antara realisasi dan anggaran. Dengan mekanisme pengendalian yang efektif, instansi dapat merespon dengan cepat terhadap ketidaksesuaian dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Melalui pengendalian akuntansi, setiap langkah dalam mencapai sasaran anggaran diawasi dengan baik, memperkuat akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran memicu implementasi pengendalian akuntansi yang efektif, meningkatkan akuntabilitas kinerja akuntansi secara keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel mediasi, yaitu pengendalian akuntansi, memiliki pengaruh signifikan dalam menghubungkan sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja akuntansi di BPKAD Provinsi Jawa Timur. Ini membuktikan kebenaran hipotesis ketujuh dalam penelitian ini. Sistem pelaporan yang efektif menyajikan informasi transparan dan akurat, dan pengendalian akuntansi memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mendukung akuntabilitas kinerja. Pengendalian akuntansi, melalui prosedur verifikasi data dan penilaian kepatuhan, menjadi jembatan antara informasi laporan dan pertanggungjawaban kinerja. Dengan mekanisme ini, instansi dapat merespons cepat terhadap masalah, mengoreksi ketidaksesuaian, dan menjaga integritas informasi yang dilaporkan. Sistem pelaporan memberikan gambaran sejauh mana instansi mencapai tujuan, dan pengendalian akuntansi memastikan pencapaian tersebut sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku, memperkuat pertanggungjawaban kinerja secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Menurut hasil analisis tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi dengan pengendalian akuntansi sebagai variabel moderasi, sehingga diperoleh simpulan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi, pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi, dan pengendalian akuntansi mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, K. 2018. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>, 1-7.
- Asgary, A., Ozdemir, A. I., & Özyürek, H. (2020). Small and medium enterprises and global risks: evidence from manufacturing SMEs in Turkey. *International Journal of Disaster Risk Science*, 11(1), 59-73
- Bastian, Indra.2010.Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga : Jakarta
- Ferina Anggraeni, S. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja iNstansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1-9.
- Helin Gustri Mulya, E. F. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntans dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1-21.
- Herawaty, N. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. https://repository.unja.ac.id/47987/1/2011_jurnal%20unja_Netty_PengaruhKejelasanAnggaran.pdf, 1-6.
- Kusumaningrum, I. (2009). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . http://eprints.undip.ac.id/7832/1/Indraswari_Kusumaningrum.pdf, 1-16.
- Mardiasmo.(2002). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset,Yogyakarta.
- Pamungkas, B. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah RanggadinG*, 1-11.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden RI tentang Nomor 29 TAHUN 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Rio Pratama, H. A. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dana Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1-16.

Seto Wibisono, I. B. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2236/2241>, 1-22.

Urip Santoso, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/view/363/347>, 1-20.

Yogi Isnanto, S. B. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/3733/3088>, 1-13.